

# BAB I

## PENDAHULUAN

### 1.1 Latar Belakang Masalah

Secara umum setiap negara memiliki tujuan. Seperti halnya Indonesia memiliki tujuan yang telah tercantum pada alinea keempat dalam Undang-Undang Dasar 1945. Satu diantaranya adalah memajukan kesejahteraan umum. Tujuan tersebut tercapai apabila pemerintah mampu menangani masalah-masalah yang terjadi di Indonesia. Di Indonesia permasalahan kemiskinan termasuk salah satu permasalahan yang krusial dalam pembangunan.

Pendapat dari Hardinandar (2019) mengartikan kemiskinan suatu keadaan tidak mampu memenuhi kebutuhan dasar seseorang, yang meliputi perumahan, pangan, sandang, dan perawatan kesehatan. Pendapat lain disampaikan oleh BPS (2016) bahwa kemiskinan ialah ketidaksanggupan dilihat melalui sisi ekonomi dalam mencukupi kebutuhan dasar makanan dan bukan makanan yang diukur dari sisi pengeluaran.

Work Bank (2019) mengungkapkan sejumlah sudut pandang tentang pentingnya mengatasi kemiskinan sebagai masalah pembangunan. Pertama, fokus pembangunan ialah pengentasan kemiskinan. Oleh karena itu, penting untuk mengukur kemiskinan secara akurat untuk lebih memahami ruang lingkungannya. Kedua, agar mempermudah penentuan distribusi orang miskin. Ketiga, sebagai data untuk menilai inisiatif pemerintah dalam memerangi kemiskinan. Keempat, menilai seberapa baik instansi pemerintah menangani persoalan kemiskinan.

Bukan hanya di negara berkembang, akan tetapi di negara maju persoalan kemiskinan bisa saja terjadi. Hanya saja persoalan kemiskinan lebih berpeluang terjadi di negara berkembang. Hal ini membuat persoalan kemiskinan menjadi persoalan yang utama yang dihadapi kebanyakan negara.

Di Indonesia terdapat daerah-daerah yang juga memiliki masalah kemiskinan, contohnya di Provinsi Sumatera Utara. Provinsi Sumatera terletak pada bagian utara Pulau Sumatera. Memiliki luas wilayah mencapai 72,981,23 km<sup>2</sup>. Provinsi ini termasuk provinsi yang mempunyai jumlah penduduk yang cukup banyak, yakni sebanyak 15.372.437 jiwa pada periode Desember 2022.

Dengan jumlah penduduk yang cukup banyak tersebut membuat daerah ini tidak lepas dari yang namanya masalah kemiskinan. Sama seperti wilayah lainnya, Provinsi Sumatera Utara juga membutuhkan penanganan yang serius dari pemerintah dalam menyelesaikan permasalahan kemiskinan.

Pemerintah memberikan perhatian yang besar untuk menangani persoalan ini, namun pada nyatanya persoalan kemiskinan masih saja belum terselesaikan. Walaupun sudah banyak para ahli menyampaikan upaya-upaya dalam penanganan kemiskinan, namun upaya tersebut belum cukup untuk menyelesaikan persoalan yang ada.

Situasi yang dapat menambah permasalahan kemiskinan ialah kemunculan pandemi Covid-19 yang memberikan dampak buruk bagi Indonesia termasuk Provinsi Sumatera Utara, dampak buruk tersebut ialah seluruh aktivitas ekonomi terganggu yang pada akhirnya berimbas terhadap situasi pengurangan kapasitas pekerja, pemutusan hubungan kerja pada sektor-sektor yang paling

berdampak pandemi sehingga mengakibatkan banyak penduduk yang menganggur. Hal ini menjadi pemicu penduduk miskin semakin bertambah akibat dari ketidakmampuan untuk memenuhi kebutuhan hidup karena tidak adanya pekerjaan atau menganggur.

Akibat dari kemiskinan dapat dirasakan oleh masyarakat, contohnya seperti terhambatnya seseorang dalam mengkonsumsi nutrisi bergizi, terhambatnya mendapat pendidikan yang tinggi, serta terbatas untuk menentukan pilihan dalam hidupnya. Hal yang sama disampaikan oleh Mulyono (2017) bahwa akibat dari persoalan kemiskinan, seperti persoalan kebodohan, pengangguran, kelaparan, ketimpangan sosial, kesehatan, dan kriminalitas juga bisa muncul. Artinya bahwa apabila masalah kemiskinan dibiarkan begitu saja dan tidak ditangani segera maka akan menjadi pemicu munculnya masalah lain yang lebih buruk sehingga menjadi penyebab kesejahteraan masyarakat sulit untuk dicapai.

Christianto (2013) mengungkapkan bahwa keadaan kemiskinan di suatu negara atau wilayah juga mampu mencerminkan bagaimana tingkat kesejahteraan penduduk yang tinggal pada negara/daerah tersebut. Artinya, apabila angka kemiskinan di suatu daerah tinggi, maka tingkat kesejahteraan penduduk masih tergolong rendah. Sehingga diharapkan pemerintah dan masyarakat semestinya harus bekerja sama dalam pengentasan kemiskinan agar kesejahteraan penduduk dapat tercapai.

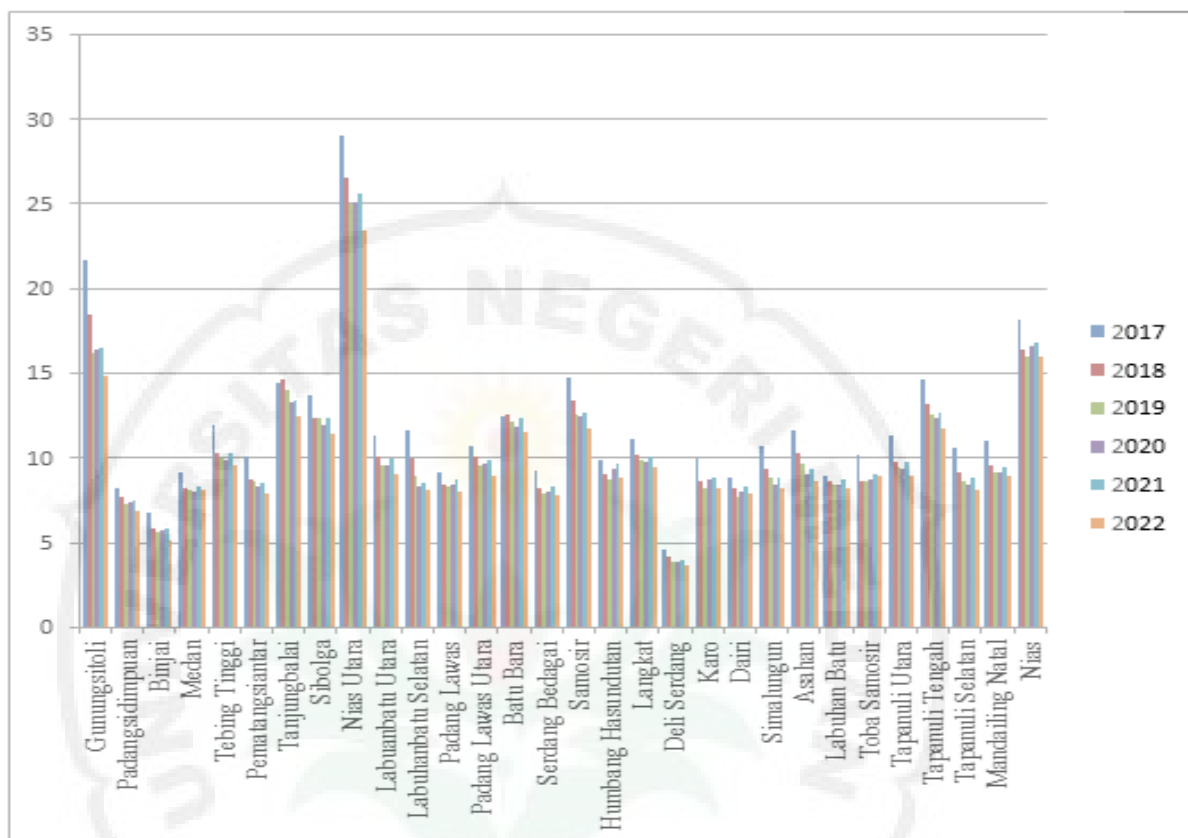
Berlandaskan data Badan Pusat Statistik Provinsi Sumatera Utara periode 2017-2022, banyaknya penduduk miskin di 30 kabupaten/kota di Provinsi Sumatera Utara berbeda-beda. Dari tahun 2017 sampai 2020 penduduk miskin di setiap kabupaten/kota mengalami penurunan. Penurunan tersebut mencerminkan terdapat peningkatan kesejahteraan penduduk yang ada di daerah tersebut.

Namun berbeda dari tahun sebelumnya, di tahun 2021 persentase penduduk miskin di setiap kabupaten/kota terjadi peningkatan. Nyatanya bila dilihat dari data bukan hanya sebagian daerah yang mengalami kenaikan penduduk miskin, namun terjadi di semua daerah Provinsi Sumatera Utara.

Akibat dari hal ini membuat daerah-daerah yang dahulunya memiliki penduduk miskin banyak semakin bertambah banyak. Sehingga semakin sulit untuk keluar dari masalah kemiskinan dan sulit untuk mencapai kesejahteraan. Pertambahan kemiskinan di setiap kabupaten/kota membuat semakin terlihatnya ketimpangan kesejahteraan antar daerah yang terdapat di Provinsi Sumatera Utara.

Penyebab kenaikan yang terjadi pada periode 2021 disebabkan oleh dampak pandemi Covid-19 yang melemahkan seluruh aktivitas ekonomi di Provinsi Sumatera Utara. Tetapi di tahun berikutnya yaitu tahun 2022 angka kemiskinan mengalami penurunan.

Gambar 1.1 di bawah ini menyajikan data selamat 6 tahun terakhir untuk membantu pembaca lebih jelas memahami gambaran persentase penduduk miskin di 30 kabupaten/kota di Provinsi Sumatera Utara.



Sumber: Data diolah, 2023

**Gambar 1.1 Persentase Penduduk Miskin Kab/Kota di Provinsi Sumatera Utara Tahun 2017-2022**

Menurut Gambar 1.1 menunjukkan data selama 6 tahun, bahwa Kabupaten Nias Utara menduduki peringkat pertama yang memiliki persentase penduduk miskin terbesar yakni 23,4% pada periode 2022. Sedangkan daerah yang memiliki persentase penduduk miskin terkecil ialah Kabupaten Deli Serdang, dengan persentase penduduk miskin sebesar 3,62% pada tahun 2022. Apabila dilihat secara keseluruhan persentase kemiskinan di Provinsi Sumatera Utara pada tahun 2022 yakni sebesar 8,42%.

Salah satu faktor yang mempengaruhi kemiskinan ialah Indeks Pembangunan Manusia (IPM). IPM dianggap sebagai indikator penting untuk mengevaluasi seberapa baik inisiatif pembangunan manusia bekerja. Peringkat

atau tingkat pembangunan suatu wilayah dapat ditentukan dengan menggunakan IPM sebagai ukuran. Standar hidup yang layak (daya beli), pengetahuan (pendidikan), dan umur panjang (kesehatan) ialah tiga dimensi yang membentuk IPM.

Umur panjang dan hidup sehat atau biasanya hal ini dilakukan untuk melihat keadaan kesehatan dalam suatu daerah. Apabila tingkat kesehatan masyarakat rendah maka akan menurunkan kinerja masyarakat, yang pada akhirnya menimbulkan masalah dalam bekerja. Apabila pekerja memiliki kinerja yang terus menurun maka akan berdampak terhadap produktivitasnya. Apabila produktivitas pekerja terus menurun akan mengakibatkan pekerja tersebut mengalami pemutusan hubungan kerja (PHK), sehingga mengakibatkan pengangguran. Ketika pekerja tersebut sudah menganggur maka pekerja tersebut tidak akan mampu memenuhi kebutuhannya, yang pada akhirnya menimbulkan masalah kemiskinan.

Selanjutnya yaitu pengetahuan atau pendidikan. Persyaratan dasar bagi sebagian besar pemberi kerja sebelum mempekerjakan seseorang ialah pendidikan. Saat merekrut karyawan baru, perusahaan mempertimbangkan pendidikan. Banyak perusahaan yang menerima pelamar kerja yang memiliki jenjang pendidikannya lebih tinggi.

Pendidikan menghasilkan para pekerja yang berkualitas, yang akan meningkatkan kualitas perusahaan. Apabila seseorang tidak memiliki pendidikan, maka orang tersebut tidak memiliki pengetahuan atau keterampilan dalam bekerja, sehingga sangat sedikit peluangnya mendapatkan pekerjaan. Apabila seseorang

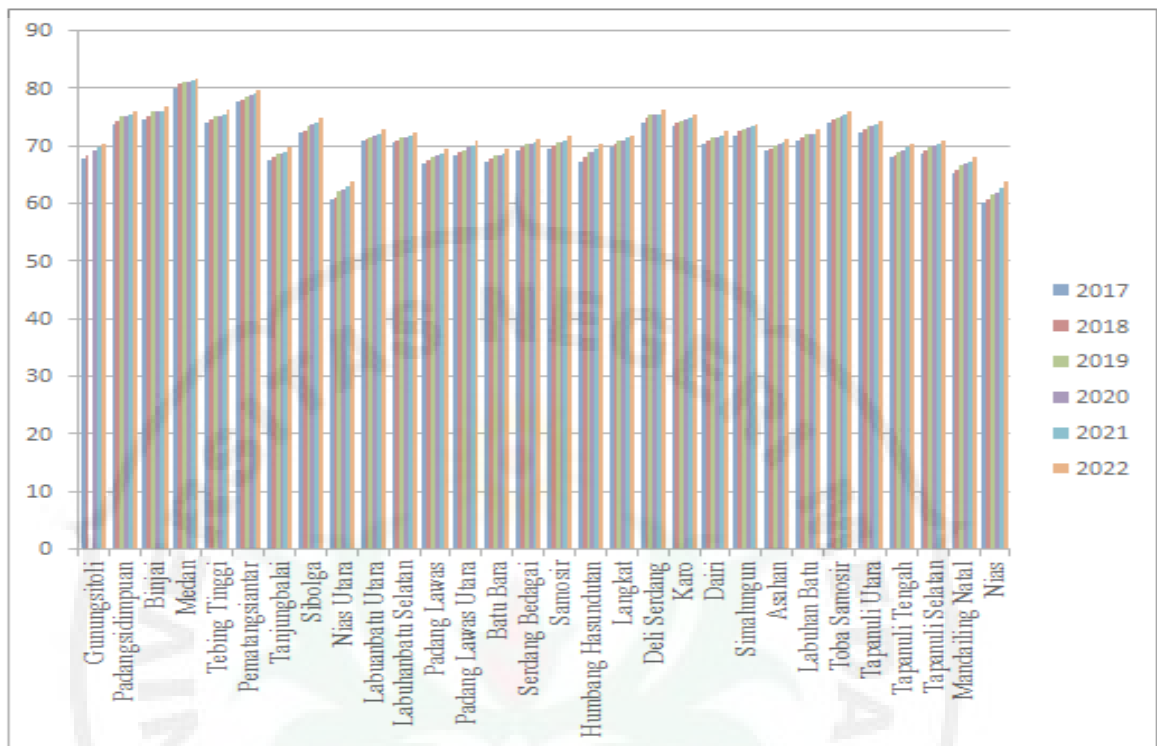
tidak bekerja atau menganggur maka tidak akan mampu memenuhi kebutuhannya, yang pada akhirnya orang tersebut dikatakan miskin.

Selain itu, standar hidup layak juga penting, karena melalui hal ini diketahui daya beli masyarakat. Dikemukakan oleh Pawenang (2016) bahwa daya beli ialah kemampuan seseorang sebagai konsumen untuk membeli barang atau jasa yang dibutuhkannya. Apabila daya beli masyarakat rendah, maka dapat dikatakan belum memperoleh hidup layak atau belum berada pada kehidupan yang sejahtera, sehingga masih dikatakan sebagai penduduk miskin.

Indeks Pembangunan Manusia dapat memberikan dampak yang baik terhadap pengurangan masalah kemiskinan. Karena semakin tinggi indeks pembangunan manusia disuatu daerah, maka semakin tercermin kesejahteraan para penduduk yang tinggal di daerah tersebut.

Berdasarkan data BPS Provinsi Sumatera Utara, IPM dari 30 kabupaten/kota yang ada di Provinsi Sumatera Utara cenderung mengalami peningkatan sejak tahun 2017 hingga tahun 2022. Dari 30 kabupaten/kota tersebut, kebanyakan memiliki IPM kelompok sedang atau  $IPM \geq 60\%$  dan  $< 70\%$  dan kelompok tinggi atau dengan  $IPM \geq 70\%$  dan  $< 80\%$ .

Gambar 1.2 di bawah ini menyajikan data penelitian tahun 2017-2022 untuk membantu pembaca lebih jelas memahami gambaran Indeks Pembangunan Manusia di 30 kabupaten/kota di Provinsi Sumatera Utara.



Sumber : Data Diolah, 2023

**Gambar 1.2 Indeks Pembangunan Manusia (Metode Baru) (persen) Kab/Kota di Provinsi Sumatera Utara Tahun 2017-2022**

Gambar 1.2 menunjukkan bahwa pada tahun 2017-2022 daerah yang memiliki IPM tertinggi ialah Kota Medan, dengan IPM sebesar 81,76% atau masuk kelompok sangat tinggi. Kota Medan adalah satu-satunya yang memiliki IPM sangat tinggi. Sedangkan Kabupaten Nias menjadi daerah yang memiliki IPM terendah yakni 63,69%. Dengan melihat gambar juga diketahui bahwa terdapat perbedaan kualitas penduduk antar kabupaten/kota di Provinsi Sumatera Utara. Jika dilihat secara keseluruhan Indeks Pembangunan Manusia di Provinsi Sumatera Utara tahun 2022 yakni sebesar 72,71%.

Dari peningkatan yang terjadi selama 6 tahun terakhir, menunjukkan bahwa Pemerintah Sumatera Utara berhasil dalam upayanya untuk melakukan



pembangunan manusia. Kenaikan IPM yang terjadi di Provinsi Sumatera Utara juga menandakan bahwa semakin membaiknya kualitas kehidupan masyarakat yang ada di daerah tersebut.

Selain IPM, penyebab bertambah atau berkurangnya jumlah penduduk miskin, dipengaruhi oleh faktor-faktor lain. Prayoga et al (2021) menyampaikan bahwa kemiskinan terjadi diakibatkan karena tidak memadainya upah minimum, buruknya taraf hidup masyarakat, serta angka pengangguran yang meningkat setiap tahun namun tidak adanya tambahan kesempatan kerja.

Dalam hal ini upah minimum dianggap sebagai salah satu hal yang penting diperhatikan dalam mengurangi kemiskinan. Seperti yang disampaikan dalam penelitian Todaro & Stephen C (2014) bahwa upah minimum bertujuan dalam meningkatkan kesejahteraan para tenaga kerja serta dengan adanya upah minimum mampu mengurangi kemiskinan.

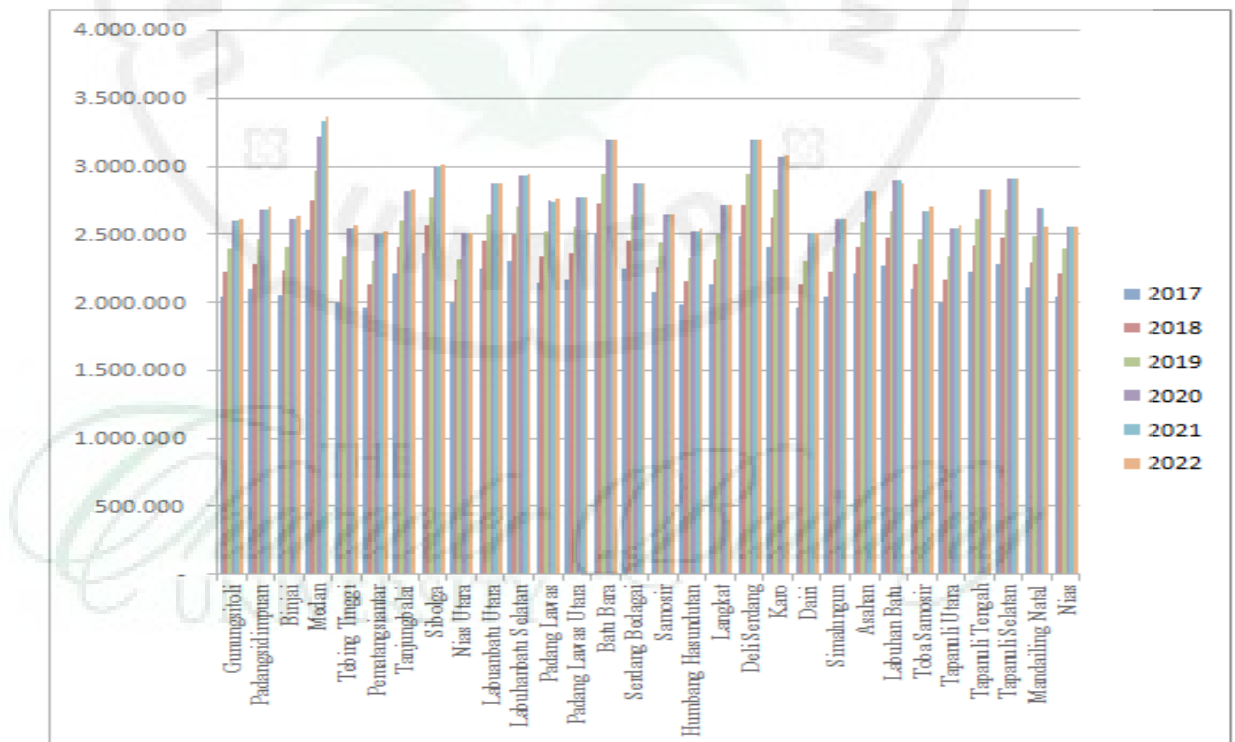
Provinsi Sumatera Utara menetapkan sistem upah minimum atau standar batas bawah nilai upah. Hal ini ditetapkan sebagai bentuk upaya dalam menetapkan keadilan bagi para pekerja agar mendapatkan upah atau gaji yang memadai sesuai dengan hasil kerja para pekerja. Dengan berlakunya standar upah minimum, pengusaha atau pemberi kerja tidak diperbolehkan membayar upah para pekerjanya lebih rendah dari upah minimum yang berlaku di daerah tersebut.

Setiap daerah, memiliki perbedaan besaran upah minimum yang berlaku. Perbedaan tersebut juga dipengaruhi oleh berbagai faktor-faktor. Salah satunya

bahwa setiap daerah memiliki standar hidup layak yang berbeda-beda, serta biaya hidup pada setiap daerah juga tidak sama.

Apabila dilihat dari data BPS Provinsi Sumatera Utara, UMK yang berlaku di 30 kabupaten/kota di Provinsi Sumatera Utara selama 6 tahun, cenderung mengalami kenaikan. Kenaikan besaran UMK terjadi dari tahun 2017 sampai 2020. Namun pada tahun 2021 UMK menetap atau tidak mengalami perubahan. Sedangkan tahun 2022 terdapat daerah yang mengalami peningkatan, penurunan serta terdapat juga yang menetap.

Untuk melihat besaran UMK yang berlaku di Provinsi Sumatera Utara maka disajikan UMK tahun 2017-2022 dalam gambar 1.3 di bawah ini.



Sumber : Data Diolah, 2023

**Gambar1.3 Upah Minimum Kab/Kota di Provinsi Sumatera Utara Tahun 2017-2022**

Dari gambar 1.3 yang disajikan di atas, diketahui bahwa tahun 2017-2022 UMK tertinggi berada di Kota Medan, dengan UMK sebesar Rp. 3.370.645, Sedangkan daerah dengan UMK terendah berada pada Kabupaten Dairi yaitu sebesar Rp. 2.504.195. Sedangkan bila dilihat secara keseluruhan Upah Minimum Provinsi di Sumatera Utara yakni sebesar Rp.2.522.610 pada tahun 2022.

Kecenderungan kenaikan UMK mencerminkan bahwa setiap tahunnya pendapatan yang diterima oleh para pekerja semakin meningkat. Apabila semakin besar upah yang diberikan oleh pengusaha kepada pekerja maka pekerja berpeluang untuk meningkatkan taraf atau standar hidupnya. Sehingga kualitas hidup yang dimiliki oleh pekerja akan jauh lebih baik. Walaupun setiap tahunnya upah minimum cenderung meningkat, akan tetapi faktanya berdasarkan data masih terdapat daerah yang memberlakukan upah minimum yang lebih rendah daripada UMP yang berlaku.

Jika melihat kondisi IPM dan tingkat kemiskinan di kabupaten/kota, daerah yang mempunyai jumlah penduduk miskin tinggi, cenderung mempunyai IPM yang rendah. Begitu juga dengan daerah yang memiliki UMK rendah, rata-rata mempunyai jumlah penduduk miskin yang tinggi. Dari paparan permasalahan yang telah dijelaskan, agar mengetahui apakah IPM dan Upah Minimum penting dalam mengatasi permasalahan yang ada, sehingga peneliti tertarik untuk melakukan penelitian yang berjudul **“Pengaruh Indeks Pembangunan Manusia (IPM) dan Upah Minimum Terhadap Kemiskinan di provinsi Sumatera Utara tahun 2017-2022”**.

## 1.2 Identifikasi Masalah

1. Dari tahun 2017-2022, di tahun 2021 persentase penduduk miskin di seluruh kabupaten/kota mengalami kenaikan.
2. Indeks Pembangunan Manusia di kabupaten/kota Provinsi Sumatera Utara kebanyakan masih tergolong dalam kelompok sedang, dan hanya Kota Medan yang memiliki IPM yang sangat tinggi.
3. Indeks Pembangunan Manusia di kabupaten/kota Provinsi Sumatera Utara mengalami peningkatan dari tahun 2019 menuju 2020, Namun terdapat daerah yang tidak mengalami peningkatan atau IPM tetap, yaitu Kota Binjai.
4. Upah Minimum Kabupaten/Kota di kabupaten/kota Provinsi Sumatera Utara mengalami kenaikan dari tahun 2017 hingga 2020, namun di tahun 2021 hanya UMK Kota Medan yang mengalami kenaikan.
5. Di kabupaten/kota Provinsi Sumatera Utara masih terdapat daerah yang memiliki UMK yang lebih rendah daripada UMP yang berlaku.

## 1.3 Pembatasan Masalah

Supaya penelitian lebih terarah serta upaya menghindari pembahasan yang menyimpang dari rumusan masalah yang telah ditentukan di atas, maka dari itu peneliti membatasi penelitian, diantaranya :

1. Penelitian ini hanya memakai variabel Kemiskinan, Indeks Pembangunan Manusia (IPM) dan Upah Minimum.
2. Data yang dipakai untuk setiap variabel penelitian hanya terdiri atas 30 kabupaten/kota di Provinsi Sumatera Utara, hal ini karena keterbatasan

data Upah Minimum Kabupaten/Kota (UMK) dari 3 kabupaten yaitu Nias Selatan, Pakpak Bharat dan Nias Barat.

3. Data yang dipakai untuk setiap variabel menggunakan data 6 tahun, terhitung dari tahun 2017 hingga 2022.

#### **1.4 Rumusan Masalah**

1. Apakah ada pengaruh Indeks Pembangunan Manusia terhadap Kemiskinan di Provinsi Sumatera Utara?
2. Apakah ada pengaruh Upah Minimum terhadap Kemiskinan di Provinsi Sumatera Utara?
3. Apakah ada pengaruh Indeks Pembangunan Manusia dan Upah Minimum terhadap Kemiskinan di Provinsi Sumatera Utara?

#### **1.5 Tujuan Penelitian**

1. Untuk mengetahui pengaruh Indeks Pembangunan Manusia (IMP) terhadap Kemiskinan di Provinsi Sumatera Utara.
2. Untuk mengetahui pengaruh Upah Minimum terhadap Kemiskinan di Provinsi Sumatera Utara.
3. Untuk mengetahui pengaruh Indeks Pembangunan Manusia (IPM) dan Upah Minimum terhadap Kemiskinan di Provinsi Sumatera Utara.

## 1.6 Manfaat Penelitian

Manfaat yang akan diperoleh beberapa pihak setelah penelitian ini selesai antara lain:

1. Bagi Peneliti

Hasil penelitian ini diharapkan dapat meningkatkan pengetahuan dan pemahaman khususnya mengenai dampak Indeks Pembangunan Manusia dan Upah Minimum terhadap Kemiskinan.

2. Bagi Pemerintahan Provinsi Sumatera Utara

Temuan penelitian ini dapat menjadi panduan yang berguna bagi pemerintah dalam merumuskan kebijakan untuk mengatasi persoalan kemiskinan di Provinsi Sumatera Utara.

3. Bagi Peneliti Selanjutnya

Temuan penelitian ini dapat menjadi acuan ketika melakukan penelitian serupa di bidang yang sama di masa mendatang.

4. Bagi Universitas Negeri Medan

Penelitian ini dijadikan bahan tambahan keustakaan di jurusan Ekonomi khususnya Program Studi Ilmu Ekonomi.

